



Perilaku Pemerintah Indonesia Dalam Memaksimalkan Welfare (Pendekatan Rawlsian-Utilitarian)

Indonesian Government Behavior In Maximizing Welfare (Rawlsian-Utilitarian Approach)

Dwi Widiarsih¹, Hefrizal Handra², Efa Yonnedi³

¹Universitas Muhammadiyah Riau, Ekonomi&Bisnis, Pekanbaru

²³Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, Padang

Email: *dwiwidiarsih@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 05 Agustus 2021

Accepted: 14 Desember 2021

Published: 20 Desember 2021

Keywords:

Fiscal Policy; Public

Economics; Public Finance

DOI:

10.37859/jae.v11i2.2712

JEL Classification: H3, E62

Abstrak

Konsep kesejahteraan utilitarian di Indonesia identik diterapkan pada penerapan kebijakan *fiscal capacity* pemerintah. Desain penelitian merupakan konsep kuantitatif yaitu desain eksperimental dengan menggunakan bobot pengukuran pendapatan perkapita, pajak, subsidi sebagai fungsi kesejahteraan Iriani-Tamoka dengan konstrain pemerintah pusat adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa *government behavior* dalam menetapkan beban pajak identik dengan behavior utilitarian dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan transfer pemerintah melalui bantuan sosial dan jaminan sosial yang didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam memaksimumkan utility melalui kesejahteraan masyarakat dibawah kendala (*constrain*) alokasi subsidi dan efek multiplier yang ditimbulkan oleh penetapan pajak pemerintah identik dengan behavior Rawlsian.

The concept of utilitarian welfare in Indonesia is identically applied to the implementation of the government's fiscal capacity policy. The research design is a quantitative concept, namely an experimental design using the weights of measuring income per capital, taxes, subsidies as a function of Iriani-Tamoka welfare with the central government constraint is to maximize the social welfare of the community. The results of the study found that government behavior in setting the tax burden is identical to utilitarian behavior in maximizing the welfare of its people. The government's transfer policy through social assistance and social security which is distributed to the community as an effort by the government to maximize utility through public welfare under the constraints of subsidy allocation and the multiplier effect caused by the determination of government taxes is identical to Rawlsian's behavior.

©JAE-UMRI 2021**PENDAHULUAN**

Perbedaan penerapan konsep kesejahteraan pada alokasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat digambarkan pada teori kesejahteraan utilitarian dan teori kesejahteraan *maximin* atau *Rawlsian*. Kesejahteraan *utilitarian identik* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan beban pajak pada jenis komoditas dan pendapatan masyarakat. Sedangkan kesejahteraan *Rawlsian* diterapkan pada kebijakan transfer pemerintah melalui bantuan sosial dan jaminan sosial yang didistribusikan kepada masyarakat. Kedua kebijakan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memaksimalkan *utility* melalui kesejahteraan masyarakat dibawah kendala (*constrain*) alokasi subsidi dan efek multiplier yang ditimbulkan oleh penetapan pajak pemerintah.

Hicks dan Arrow dalam Priyono (2012) menemukan fungsi kesejahteraan merupakan turunan dari preferensi individu. Pemaksaan satu individu terhadap individu lainnya mungkin dapat terjadi dalam upaya pencapaian kesejahteraan maksimum tersebut. Namun, implikasi dari penemuan fungsi kesejahteraan ini telah menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan untuk mewujudkan kepentingan umum seperti penerapan pada teori pajak rata-rata (*lump taxation*). Keefektifannya memang masih diperdebatkan karena efek distribusinya tidak merata. Oleh karena itu, batas kemungkinan kepuasan masyarakat (*utility possibility frontier*) sebaiknya didesain oleh *political economy* pemerintah agar relevansi dapat dinilai bermanfaat oleh masyarakat dan pemerintah.

Konsekuensi *deadweight loss* menyebabkan beban pajak kepada masyarakat dan beban transfer dari pemerintah dinilai sangat berat. Konsep utilitarian akan memilih distribusi pendapatan yang persis sama dan mengharapkan pareto yang optimal. Namun, ketika bobot nilai tertentu dari fungsi utilitas individu yang terbebani oleh konsep pendapatan relatif rendah seorang utilitarian akan memilih distribusi pendapatan yang persis sama dengan seorang perencana kebijakan *Rawlsian* (Oded, 2014).

Penelitian tentang konsep kesejahteraan ekonomi melalui teori kesejahteraan utilitarian dan *Rawlsian* ini diharapkan dapat menjadi dasar penambahan wawasan bagi peneliti. Selain itu, hasil penelitian diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya sehingga ilmu pengetahuan khususnya untuk teori ekonomi mikro dapat lebih berkembang.

Teori Kesejahteraan Sosial

Tiebout (1965) menyatakan bahwa efisiensi ekonomi dicapai melalui pelayanan publik dengan asumsi rumah tangga memutuskan untuk tinggal di lokasi yang cocok dengan *preferences* mereka tentang pengenaan pajak serta barang dan jasa yang disediakan, sehingga pemerintah sebaiknya berkompetisi dalam menawarkan tingkat dan jenis layanan dan pengenaan tingkatan pajak tersebut. Oates (1972) juga memberikan kesimpulan yang hampir sama bahwa upaya memaksimalkan *welfare* karena ada perbedaan *preferences* antar wilayah dan ketiadaan efek *spill-over*, sehingga dengan asumsi adanya sentralisasi penyediaan layanan publik dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Teori Kesejahteraan Utilitarian

Bentham (1776) berpendapat bahwa, kebahagiaan merupakan konsep kebahagiaan untuk sebahagian masyarakat yang dapat diukur dari nilai benar atau salahnya suatu kebijakan. Sehingga, kebijakan atau regulasi pemerintah berperan penting untuk menciptakan efisiensi lainnya untuk konsep berbisnis masyarakat contohnya dan juga untuk seluruh aspek kehidupan lainnya. Pemikiran Bentham ini menjadikan ia dikenal sebagai filsuf beraliran Utilitarian dimana konsep kesejahteraan berangkat dari unsur kebahagiaan yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

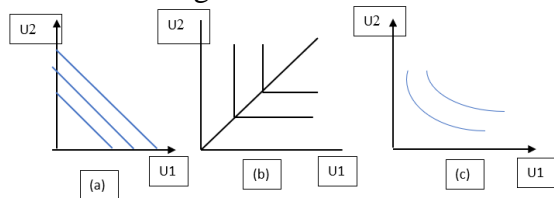
Teori Kesejahteraan Rawlsian

Menurut Rawls (1971) menyatakan bahwa konsep utilitas di suatu masyarakat berarti adanya upaya untuk mengutamakan golongan masyarakat yang kurang beruntung agar prinsip keadilan ekonomi dapat tercapai. Dalam prakteknya, pemerintah dapat menerapkan sistem jaminan sosial inklusif.

Preferensi Pemerintah Pusat Tentang Tingkat Pajak

Pemerintah menghadapi kendala untuk meningkatkan *fiscal capacity* karena keterbatasan mencapai akses-akses sumber pendapatan sebagai komponen pajak dasar (*tax basic*) negara. Pemerintah biasanya akan menghadapi defisit tabungan jika dibandingkan dengan Investasi (*saving investment gap*) apabila sumber pembiayaan negara juga mengalami defisit. Kondisi inilah yang dijadikan alasan dasar bagi pemerintah untuk menyatakan bahwa upaya pencapaian maksimal utilitas masyarakat melalui kebijakan pengeluaran pemerintah terkendala bahkan jauh dari target atau tujuan kebijakan. Konsep ini dapat digambarkan melalui kurva di bawah ini;

Gambar 1. Fungsi Sosial Welfare



Pada kurva a menggambarkan konsep utilitarian murni (*Purely Utilitarian*) dan kurva b menggambarkan konsep Rawlsian (Maximin or Rawlsian) dan c menggambarkan konsep utilitarian secara umum (*Generalized Utilitarian*). Utilitarian murni mengasumsikan masyarakat berada dalam kondisi *behind the veil of ignorance* (ketidaktahuan) pada proses optimasi utilitas sosial masyarakat. Akan terdapat sejumlah kekayaan masyarakat dan didistribusikan dalam jumlah yang tetap kepada setiap individu-individu. Utilitarian secara umum memiliki fungsi utilitas yang cekung. Optimalisasi sosial utilitarian murni akan menjadi unik ketika mendistribusikan kekayaan antar individu karena berupaya untuk menyamakan utilitas marjinal kekayaan di seluruh konsumen atau masyarakat. Kedua konsep ini identik dengan penetapan kebijakan pajak pemerintah.

Artinya, konsep kesejahteraan Utilitarian identik diberlakukan pada kebijakan perpajakan. Utilitarian menyatakan peningkatan atau penurunan utilitas individu diterjemahkan ke dalam perubahan yang sama dalam utilitas sosial. Optimalisasi sosial utilitarian juga dapat menjadi unik dalam penerapan penetapan kebijakan pajak karena akan terjadi bergesekan (benturan tujuan *political economy* penguasa atau pemerintah) dengan kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan pengeluaran pajaknya untuk transfer subsidi dan kebijakan jaminan sosial.

Preferensi Pemerintah Pusat Tentang Subsidi

Tekanan pendapatan fiskal pemerintah dihadapkan dengan tuntutan dari masyarakat agar mereka mendapatkan bantuan subsidi khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Masyarakat berharap kualitas kesejahteraan mereka dapat meningkat. Pemerintah juga dituntut untuk menjalankan fungsi distribusinya dengan menyalurkan program bantuan sosial kepada masyarakat seperti raskin dan BLT untuk kelompok serta individu masyarakat yang rentan karena kemiskinan dan cacat dan bentuk jaminan sosial lainnya seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Bantuan sosial ini merupakan upaya pemerintah untuk

mencegah menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang dialokasikan dari pendapatan pajak dan perolehan BUMN (Widjaja, 2012).

Dilema apakah subsidi dan bantuan sosial ini memang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah telah tepat digunakan oleh sektor produktif dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat tertentu. Konsep kesejahteraan utilitarian diidentifikasi telah diterapkan pada kebijakan subsidi dan jaminan sosial ini. Jika memang benar adanya, maka dapat dikatakan pemerintah belum mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yaitu desain eksperimental dalam mengidentifikasi fenomena ekonomi dan merumuskan masalah, agar penjelasan tentang hubungan antar variabel penelitian dan analisa data dapat menjawab tujuan dari penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dimulai pada bulan Mei-September 2021 dalam lingkup kajian 34 Propinsi di Indonesia selama lima tahun series data penelitian yaitu tahun 2016-2020. Adapun subjek penelitian menggunakan series data lima tahun penelitian untuk variabel-variabel terkait dengan konsep kajian *behavior* pemerintah Indonesia dalam menetapkan dan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanjanya selama lima tahun (2016-2020). Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat dan Daerah (APBN dan APBD), pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, pajak daerah dan nasional, Subsidi, Investasi dan jumlah penduduk di setiap wilayah Propinsi di Indonesia. Operasional variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini;

Tabel 1. Operasional Pengkodean Variabel Penelitian

Notasi	Variabel	Definisi	Sumber Data
Xi	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	APBD adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Daerah Propinsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah daerah dalam masa satu tahun	Data Tahunan BPS
Ei	Pengeluaran Pemerintah Daerah	Pengeluaran Pemerintah Daerah merupakan jumlah pengeluaran untuk Investasi swasta, Investasi publik dan pengeluaran public pemerintah Daerah Propinsi.	Data Tahunan BPS
mi	Multiplier	Multiplier merupakan rasio antara APBD dan Pengeluaran Pemerintah	Hasil perhitungan manual.
ti	Pajak Nasional	Merupakan rasio jumlah pajak nasional dan pendapatan pajak propinsi, tidak termasuk pajak konsumsi	Laporan tahunan BPS
Si	Subsidi	Alokasi pengeluaran nasional untuk transfer setiap daerah propinsi. Dalam bentuk bantuan uang atau barang.	Laporan tahunan BPS.
Ti	Pajak Daerah	Pajak Daerah merupakan pungutan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Laporan tahunan BPS
Pi	$Pi = Ei - Si - Ti - Ii$	Pengeluaran pemerintah lainnya	Hasil perhitungan manual
Ii	Investasi	Merupakan jumlah investasi swasta	Laporan tahunan BPS

		daerah Propinsi		
s	Rasio pengeluaran	Rasio pengeluaran merupakan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran nasional.	Perhitungan berdasarkan tahunan BPS	manual laporan

Sumber: Data Sekunder Pengkodean Fungsi Kesejahteraan Iriani-Tamoka, BPS 2021

Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik bobot pengukuran Pendapatan perkapita setiap propinsi diformulasikan sebagai berikut (Tamoka et al, 2005);

$$Y_i = (1-t_i)m_i(S_i + T_i + P_i + I_i) \dots\dots\dots (1)$$

di mana t_i adalah tarif pajak nasional di propinsi i , dan m_i adalah pengali untuk pengeluaran pada propinsi tersebut. Jadi, satu unit pengeluaran Propinsi i menghasilkan m_i unit pendapatan di Propinsi tersebut. Sehingga, $m_i(S_i + T_i + P_i + I_i)$ adalah pendapatan sebelum pajak pada Propinsi i , di mana jumlah $S_i + T_i + P_i + I_i$ menunjukkan pengeluaran di Propinsi tersebut. Notasi S_i merupakan sumber pendapatan subsidi. Nilai subsidi ini diukur dari jumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. T_i merupakan pendapatan pajak daerah Propinsi i , P_i merupakan pengeluaran publik lainnya, dan I_i merupakan investasi sektor swasta di setiap Propinsi.

Fungsi kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat adalah penjumlahan tertimbang dari kesejahteraan tiap Propinsi, dan masalah maksimalisasinya diberikan oleh;

$$\max_{S_i, \dots, S_n} \sum_i \alpha \ln\left(\frac{Y_i}{N_i}\right) \text{ s.t. } \sum_i S_i \leq s \quad \sum_i t_i m_i (S_i + T_i + P_i + I_i) \dots\dots\dots (2)$$

Fungsi kesejahteraan untuk setiap wilayah Propinsi i adalah;

$$u_i(Y_i/N_i) = \ln(Y_i/N_i) \dots\dots\dots (3)$$

Y_i/N_i adalah pendapatan per kapita Propinsi i , yang telah memasukkan seluruh unsur yang mewakili nilai kesejahteraan seperti pada formulasi (1) di atas, dimana α_i adalah faktor tertimbang di Propinsi i , dan s ($0 < s < 1$) adalah persentase tetap dari pengeluaran pemerintah pusat yang dikeluarkan untuk pemerintah daerah. Sehingga, untuk memecahkan masalah maksimisasi pada persamaan (2) menghasilkan;

$$\alpha_i = \frac{(1 - s t_i m_i) E_i}{\sum_j (1 - s t_j m_j) E_j} \dots\dots\dots (4)$$

Sebelum membahas konstrain pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat, maka perlu untuk membahas nilai m_i , yaitu nilai multiplier pengeluaran tiap wilayah propinsi. Jadi, satu unit pengeluaran di provinsi i menghasilkan m_i unit pendapatan di wilayah Propinsi tersebut. Semakin besar nilai m_i maka semakin besar manfaat nilai pengeluaran propinsi yang telah dilakukan karena semakin besarnya nilai pendapatan yang dapat diciptakan dari setiap unit pengeluaran tersebut.

Teori mikro ekonomi tentang efek multiplier ini juga dapat menentukan timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik sehingga diharapkan pengeluaran akan barang publik tersebut dapat menciptakan nilai pendapatan barang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi distribusi merupakan peran pemerintah untuk menyesuaikan bagian pendapatan secara nasional terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di setiap wilayah Propinsi Indonesia. Fungsi distribusi ini dapat dilihat dari nilai rasio antara pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran total pengeluaran nasional. Pada penelitian ini, nilai rasio dinotasikan sebagai s .

Tabel 2. Government Behavior Indonesia

Provinsi	ti mi	(1- s ti mi)	Ei	(1-Sitimi)Ei	ai
Aceh	4,21	- 3,21	75.777.948.000.000	- 242.871.576.481.997	0,252
Sumatera Utara	0,98	0,02	67.932.718.000.000	1.664.066.997.771	- 0,002
Sumatera Barat	1,37	- 0,37	32.578.156.000.000	- 12.205.807.768.815	0,013
Riau	1,19	- 0,19	45.525.502.000.000	- 8.455.147.684.996	0,009
Jambi	1,26	- 0,26	22.908.154.000.000	- 5.888.767.111.896	0,006
Sumatera Selatan	1,11	- 0,11	44.429.839.000.000	- 4.669.049.961.984	0,005
Bengkulu	1,75	- 0,75	16.068.566.000.000	- 12.094.400.798.929	0,013
Lampung	1,06	- 0,06	35.345.067.000.000	- 2.264.394.065.604	0,002
Kepulauan Bangka Belitung	1,42	- 0,42	12.874.562.000.000	- 5.420.754.956.609	0,006
Kepulauan Riau	1,19	- 0,19	17.494.950.000.000	- 3.281.831.781.085	0,003
DKI Jakarta	0,72	0,28	388.643.890.000.000	108.208.538.716.539	- 0,112
Jawa Barat	0,73	0,27	186.566.828.000.000	51.222.128.904.384	- 0,053
Jawa Tengah	0,84	0,16	126.390.398.000.000	19.864.435.997.451	- 0,021
DI Yogyakarta	1,53	- 0,53	28.162.715.000.000	- 14.937.496.432.547	0,015
Jawa Timur	0,82	0,18	162.744.713.000.000	29.016.610.123.213	- 0,030
Banten	0,88	0,12	56.674.389.000.000	6.823.717.490.698	- 0,007
Bali	0,79	0,21	33.298.789.000.000	7.124.117.322.273	- 0,007
Nusa Tenggara Barat	1,48	- 0,48	25.314.949.000.000	- 12.117.887.968.436	0,013
Nusa Tenggara Timur	2,17	- 1,17	26.388.859.000.000	- 30.953.267.397.795	0,032
Kalimantan Barat	1,14	- 0,14	28.481.348.000.000	- 4.120.354.152.122	0,004
Kalimantan Tengah	1,43	- 0,43	23.769.931.000.000	- 10.123.080.347.598	0,010
Kalimantan Selatan	1,01	- 0,01	32.938.672.000.000	- 270.357.645.926	0,000
Kalimantan Timur	0,92	0,08	48.173.561.000.000	4.067.734.627.342	- 0,004
Kalimantan Utara	2,70	- 1,70	14.077.763.000.000	- 23.862.658.912.586	0,025
Sulawesi Utara	1,51	- 0,51	20.041.377.000.000	- 10.280.933.723.277	0,011
Sulawesi Tengah	1,75	- 0,75	19.986.293.000.000	- 15.072.714.705.915	0,016
Sulawesi Selatan	0,99	0,01	45.359.863.000.000	514.818.991.451	- 0,001
Sulawesi Tenggara	2,22	- 1,22	21.525.478.000.000	- 26.175.109.507.937	0,027
Gorontalo	1,96	- 0,96	9.047.276.000.000	- 8.704.751.698.304	0,009
Sulawesi Barat	2,72	- 1,72	9.853.305.000.000	- 16.965.935.384.760	0,018
Maluku	3,17	- 2,17	15.371.700.000.000	- 33.429.543.629.585	0,035
Maluku Utara	4,20	- 3,20	13.011.716.000.000	- 41.600.096.808.144	0,043
Papua Barat	9,01	- 8,01	41.295.070.000.000	- 330.744.660.683.874	0,343
Papua	5,51	- 4,51	70.397.581.000.000	- 317.266.750.557.957	0,329
Total				- 965.271.160.997.559	1,000

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan analisa tabel 2 olah data diketahui bahwa wilayah Propinsi DKI Jakarta memiliki nilai multiplier efek paling besar dibandingkan dengan wilayah Propinsi lainnya, diikuti oleh Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur. Wilayah pulau Sumatera juga memiliki nilai multiplier efek namun masih jauh dibawah nilai tiga wilayah ini. Propinsi di wilayah pulau Sumatera yang dimaksud adalah Sumatera Utara, Aceh dan Riau. Adapun wilayah dengan nilai multiplier terkecil adalah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dan Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tabel 2 olah data, selanjutnya diketahui bahwa fungsi kesejahteraan tertinggi terdapat di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Papua. Barat dan Papua. Hasil ini

menjadi temuan menarik mengingat pemerintah telah menyusun program pemindahan Ibukota Baru ke wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang tentu saja mempertimbangkan kondisi kesiapan daerah, kelayakan sumber daya dan variabel ekonomi penentu lain untuk mendukung terlaksananya program ini.

Berdasarkan tabel 2 hasil olah data, diketahui bahwa fungsi distribusi pemerintah sangat efektif di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan wilayah Gorontalo, Sulawesi barat dan Maluku Utara dinilai sebagai wilayah dengan fungsi distribusi pemerintah yang kurang efektif.

Konsep Utilitarian dan Walrasian Pemerintah Indonesia

Efektifitas nilai subsidi pemerintah pusat dinotasikan sebagai S_k merupakan distribusi pengeluaran pemerintah untuk subsidi kepada pemerintah wilayah Propinsi dengan nilai s ($0 < s < 1$). Sehingga efektifitas nilai subsidi pemerintah harus memenuhi batas nilai $1 - s_{kmax}$. Nilai S_k menyiratkan bahwa t_{imj} berhubungan negatif dengan α_i . Artinya, Propinsi dengan nilai pendapatan pajak lebih besar (t_{imj}) diberi bobot kesejahteraan lebih sedikit dari pemerintah pusat. Nilainya kurang dari satu karena satu unit subsidi yang diberikan ke Propinsi k akan menghasilkan unit pendapatan pajak dan hanya sebagian kecil dari mereka mendapatkan manfaat subsidi.

Sehingga, wilayah Propinsi di Indonesia dengan nilai t_{imj} tinggi dan positif akan mendapatkan nilai kesejahteraan sosial rendah karena tidak efektifnya nilai subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk Wilayah Propinsi ini. Berdasarkan tabel hasil olah data diketahui bahwa Propinsi Papua, Papua Barat dan Aceh merupakan wilayah dengan bobot nilai t_{imj} yang rendah dan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga wilayah Propinsi di Indonesia ini menjadi wilayah dengan nilai kesejahteraan sosial terendah dibandingkan seluruh wilayah Propinsi lainnya karena pada wilayah ini berarti alokasi pengeluaran pemerintah untuk subsidi tidak efektif. Sedangkan wilayah dengan efektifitas nilai subsidi tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali.

Selanjutnya berdasarkan notasi u_i yaitu utilitas penduduk di setiap wilayah Propinsi i yang tergambar pada persamaan (1), Tabel olah data diketahui bahwa 25 wilayah (sebagian besar) Propinsi memiliki nilai t_{imj} yang rendah dan negatif dan 9 wilayah Propinsi lainnya bernilai tinggi dan positif. Perhitungan nilai ini dapat memberikan kesimpulan bahwa perilaku pemerintah dalam mengalokasikan unit pendapatan pajaknya yang diperoleh dari setiap wilayah Propinsi telah mendukung konsep utilitarian untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya, karena secara umum pemerintah dengan *behavior* utilitarian akan memaksimalkan atau memecahkan masalah maksimisasi konstrain kesejahteraan untuk seluruh masyarakatnya.

Tabel 3. Analisa Olah Data Efektifitas Pajak dan Subsidi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.809	.213		-27.281	.000		
LnEP	-2.331	.257	.888	9.061	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LnKonstrain

Tabel 4. Model Summary Government Behavior Indonesia

Model	R	R	Adjusted	Std.	Change Statistics	Durbin-
-------	---	---	----------	------	-------------------	---------

		Square	R Square	Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Watson
1	.888 ^a	.789	.779	.68457	.789	82.106	1	22	.000	1.660

a. Predictors: (Constant), LnEP

b. Dependent Variable: LnKonstrain

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 4. Uji Casewise Diagnostics Variabel

Case Number	Std. Residual	Ei	Predicted Value	Residual
1	5.269	7.58E+008	72304829.7996	685474650.20044

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 5. Residual Statistik Variabel

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-2243873.2500	84044784.0000	62792014.7647	18556183.24515	34
Std. Predicted Value	-3.505	1.145	.000	1.000	34
Standard Error of Predicted Value	22474410.000	82442224.000	28321774.117	14112380.570	34
Adjusted Predicted Value	-17202804.0000	87221120.0000	62041519.7937	22199758.94305	34
Residual	-70555336.00000	685474624.00000	.00000	128099269.54981	34
Std. Residual	-.542	5.269	.000	.985	34
Stud. Residual	-.553	5.371	.002	1.004	34
Deleted Residual	-73294776.00000	712089472.00000	750494.97105	133218122.77661	34
Stud. Deleted Residual	-.547	16.835	.342	2.932	34
Mahal. Distance	.014	12.284	.971	2.894	34
Cook's Distance	.000	.560	.020	.096	34
Centered Leverage Value	.000	.372	.029	.088	34

a. Dependent Variable: Ei

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 3-5 di atas, diketahui bahwa fungsi kesejahteraan sosial dan manfaat marjinal dari subsidi untuk i diberikan oleh nilai rata-rata ekspenditur pemerintah terutama untuk subsidi. Syarat yang harus terpenuhi adalah nilai $E_i = E_j$, atau Jumlah pengeluaran di Propinsi i dan propinsi k rata-rata haruslah sama. Berdasarkan hasil olah data distribusi frekuensi dan *casewise Diagnostics* diketahui bahwa terdapat observasi atau sampel untuk E_i memilih nilai absolut standardized atau disebut sebagai data outlier yang lebih dari tiga hanya pada satu unit observasi (*case number*). Artinya, dengan nilai mean sebesar 62792014,76, maka sebaran nilai E_i tidak menyimpang dari nilai mean ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata ekspenditure (E_i) pemerintah telah memenuhi syarat fungsi kesejahteraan yang identik dengan *behavior* walrasian.

Fungsi Kesejahteraan Sosial untuk Indonesia

Fungsi kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat adalah penjumlahan tertimbang dari kesejahteraan seluruh wilayah Propinsi di Indonesia, dan masalah maksimalisasinya diberikan oleh persamaan (3) dapat dijelaskan bahwa α_i adalah faktor tertimbang di wilayah Propinsi i , dan s ($0 < s < 1$) adalah persentase tetap dari pengeluaran pemerintah pusat yang dikeluarkan

untuk pemerintah daerah. Artinya, fungsi kesejahteraan pemerintah dari pusat merupakan penjumlahan tertimbang dari kesejahteraan di setiap Propinsi. Memecahkan masalah maksimalisasi pemerintah pusat dirumuskan pada persamaan (3) di atas.

Berdasarkan hasil temuan Tajika (2015) wilayah dengan nilai α_i yang tinggi terdapat pada wilayah Kota besar atau wilayah metropolitan utama di suatu negara. Nilai α_i mencerminkan kesesuaian upaya pemerintah dalam memecahkan masalah maksimalisasi fungsi kesejahteraan negaranya. Wilayah yang memberikan sumbangsih besar bagi pendapatan total dari pajak bagi pemerintah pusat tidak akan mengalami distorsi pajak karena mendapatkan kembali manfaat pajak yang telah mereka setorkan ke pemerintah daerah. Sebaliknya, wilayah Propinsi dengan nilai tertimbang pendapatan perkapita yang rendah akan mendapatkan manfaat fungsi distribusi pemerintah melalui peran subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga nilai α_i mencerminkan kesesuaian nilai manfaat pajak dan subsidi ini.

Namun berdasarkan tabel 2 olah data diketahui bahwa konstrain pemerintah dalam upaya untuk maksimalisasi fungsi kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak memenuhi syarat fungsi tersebut karena diketahui bahwa terdapat tiga wilayah Propinsi di Indonesia dengan nilai α_i tertinggi yaitu Papua, Papua Barat dan Aceh (bukan untuk wilayah Propinsi dengan ibukota sebagai Kota besar atau metropolitan seperti DKI Jakarta). Kita ketahui bahwa tiga Wilayah Propinsi ini bukan merupakan Kota yang diposisikan sebagai Kota besar di Indonesia namun sebaliknya merupakan wilayah dengan nilai bobot kesejahteraan ($t_i m_i$) yang rendah.

SIMPULAN

Upaya pemerintah dalam menetapkan beban pajak identik dengan *behavior* utilitarian untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan Rawlsian diterapkan pada kebijakan transfer pemerintah melalui bantuan sosial dan jaminan sosial yang didistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan upaya pemerintah dalam memaksimumkan *utility* melalui kesejahteraan masyarakat dibawah kendala (*constrain*) alokasi subsidi dan efek multiplier yang ditimbulkan oleh penetapan pajak pemerintah identik dengan *behavior walrasian*.

Meskipun DKI Jakarta merupakan wilayah dengan bobot kesejahteraan sosial tertinggi namun tidak mendukung upaya pemerintah untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan masyarakatnya karena posisi DKI Jakarta dengan Ibukotanya yang identik dengan kota besar atau kota metropolitan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai wilayah dengan maksimalisasi fungsi kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Artinya penetapan jumlah pajak dan subsidi oleh pemerintah belum mampu memaksimumkan utiliti melalui kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Behavior pemerintah yang *utilitarian* dan *walrasian* dalam menerapkan kebijakan unit pendapatan pajak dan mengalokasikannya untuk pengeluaran subsidi sebaiknya melakukan koordinasi yang tepat terutama dalam koordinasi praktek desentralisasi kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur wilayah atau daerahnya sendiri dibawah pengawasan pemerintah pusat. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat melalui teknis pengumpulan unit pendapatan pajak dan mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran subsidi dan bantuan sosial lainnya ada baiknya lebih menerapkan teknologi digital layanan publik dan penganggaran sektor publik seperti data digital kependudukan, layanan transaksi E-Money, elektronik budgeting dan bentuk lainnya agar koordinasi penyediaan layanan publik, bantuan serta jaminan sosial memang diperuntukkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Ranifial, Taufiq Marwa, Imelda. Analisis Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 14 No.1 (2016) 31-40.
- Aminah. Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan terhadap Masyarakat Adat. *MMH* Jilid 43 No. 2 (2014) 172-178.
- Charles M. Tiebout. A Pure Theory of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*, Vol. 64, No. 5, (Oct., 1956), pp. 416-424
- Christophe Muller. Price index dispersion and utilitarian social evaluation. *Economics Letters* 89 pp 141–146, 2005.
- Damanhuri Fattah. Teori Keadilan Menurut John Rawls.. *TAPIS* Vol.9 No.2 (2013) 31-45.
- Ista Aryogi, Dyah Wulansari. Subjective Well-being Individu dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 01 (2016) 1-12.
- Iqbal Hasanuddin. Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. *Reflesi* Volume 17 Nomor 2 (2018) 193-204.
- Jaideep Roy, Randy Silvers, Ching-Jen Sun. Majoritarian preference, utilitarian welfare and public information in Cournot oligopoly. *Games and Economic Behavior* 116 (2019) 269–288.
- Leonardo Becchetti Luigino Bruni Stefano Zamagni. (2019). *he Microeconomics of Wellbeing and Sustainability 1st Edition, Recasting the Economic Process*. Academic Press, Italy.
- Lincoln Arsyad. (1999). *Ekonomi Mikro*. Gemapress, Jakarta.
- Martin Lackner, Piotr Skowron. Utilitarian welfare and representation guarantees of approval-based multiwinner rules. *Artificial Intelligence* 288 (2019) 10-25.
- Oded Stark, Marcin Jakubek, Fryderyk Falniowski. Reconciling the Rawlsian and the utilitarian approaches to the maximization of social welfare. *Economics Letters* 122 (2014) 439–444.
- Priyono dan Zainuddin Ismail. 2012. *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu, Surabaya.
- Siti Mardiyah. Efisiensi Alokasi dalam Pandangan Adiwarman A. Karim. *Islamic Banking* Volume 2 Nomor 1 (2016) 11-21.
- Timbul Hamonangan Simanjuntak, Imam Mukhlis.(2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- T Soemarnonugroho. Latar Belakang Konsep Welfare-state dalam Sistem Ekonomi-Politik Amerika Serikat. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 12 (1999) 43-53.
- Tomoya Tajika. Japanese Government and Utilitarian Behavior. *Journal of the Japanese and International Economies* 36 (2015) 90-107.